

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab 1, II, III dan IV maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh *Bildungswissen* (bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa) terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, yang besarnya cukup signifikan. Ini berarti semakin tinggi pengaruh *Bildungswissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.
2. Terdapat pengaruh *Orientierungswissen* (harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-kondisi politik yang belum mantap) terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, yang besarnya sangat signifikan. Ini berarti semakin tinggi pengaruh *Orientierungswissen* dalam ormawa terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.
3. Terdapat pengaruh *Verhaltungswissen* (memahami hukum, norma, tata tertib dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik) terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, yang besarnya cukup signifikan. Ini berarti semakin tinggi pengaruh *Verhaltungswissen* dalam ormawa terhadap tingkat

partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.

4. Terdapat pengaruh *Aktion-wissen* (sanggup merefleksikan peristiwa-peristiwa politik dan membuahkan ide-ide dan aksi atau tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan) terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, yang besarnya cukup signifikan. Ini berarti semakin tinggi pengaruh *Aktionwissen* dalam ormas terhadap tingkat partisipasi politik mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik mahasiswa.
5. Faktor yang dominan mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa adalah dimensi *Orientierungswissen* (harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan, noda dan unsur destruktif lainnya). Namun dimensi ini merupakan satu kesatuan dengan dimensi Pendidikan Politik melalui surat kabar lainnya seperti: *Bildungswissen*, *Verhaltungswissen* dan *Aktion-wissen*.
6. Secara deskriptif pendidikan politik yang dilakukan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan oleh siswa termasuk dalam kriteria cukup. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan dengan mengombinasikan *Bildungswissen*, *Orientierungswissen*, *Verhaltungswissen* dan *Aktion-wissen* mempunyai pengaruh cukup positif terhadap partisipasi politik mahasiswa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan agar lebih meningkatkan aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa) karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang politik yang pada akhirnya akan direalisasikan melalui partisipasi atau perilaku politiknya.

2. Bagi Ormawa

Dengan keterbatasan kegiatan di organisasi kemahasiswaan (Ormawa), maka Ormawa hendaknya lebih banyak menambah kegiatan kemahasiswaan khususnya yang berkaitan dengan bidang politik misalnya debat politik dan demonstrasi terhadap kebijakan yang dinilai tidak memihak rakyat.

3. Bagi Peneliti

Guna ketepatan proses dan hasil penelitian, maka dalam melakukan penelitian dengan topik pendidikan politik, Ormawa dan kesadaran politik ini maka sebaiknya menggunakan metode penelitian yang tepat, tidak hanya menghitung dan menjelaskan secara kuantitatif (dalam bentuk angka) akan tetapi juga menjelaskannya secara kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menafsirkan data penelitian dari bentuk angka-angka ke dalam data yang berbentuk penjelasan atau pemaparan. Hal itu dimaksudkan agar pembaca dapat lebih memahami hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperbaiki proses pendidikan politik yang selama ini dilakukan baik secara formal maupun non-formal melalui suatu kebijakan dengan cara memasukkan materi-materi politik ke dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi khususnya pada mata kuliah yang terkait dengan bidang politik seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik serta memberikan kebebasan terhadap mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Hal itu dimaksudkan agar mahasiswa lebih termotivasi dan lebih intens dalam berorganisasi sehingga dapat memunculkan partisipasi politik mahasiswa itu sendiri.

